

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Implementasi e-government di Dinas Sosial Kabupaten Sleman dalam pengelolaan data DTKS dan DTSEN selaras dengan kerangka teori Indrajit (2016) yang menekankan elemen Support, Capacity, dan Value.

Pada elemen Support, dukungan politik dari Bupati tercermin dalam visi dan misi pemerintah daerah yang mendorong tata kelola birokrasi yang responsif melalui e-government terintegrasi, didukung oleh regulasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2025 yang menggabungkan DTKS, PKSE, dan REGROSEK menjadi satu basis data terpadu yaitu DTSEN. Namun, kompleksitas birokrasi yang melibatkan approval lintas lembaga memperlambat proses pengusulan dan finalisasi data. Pada elemen Capacity, Dinas Sosial Sleman telah menyediakan sumber daya manusia yang kompeten serta infrastruktur teknologi untuk mengoperasikan aplikasi SIKS-NG dan PAK MAMAN, termasuk fasilitas pelacakan mandiri permohonan dan aduan. Namun peneliti menemukan kendala yaitu *Inclusion Error* dan *Exclusion Error* pada aplikasi SIKS-NG serta verifikasi lapangan yang tidak terjadwal secara pasti, menyebabkan implementasi e-government belum sepenuhnya digital karena masih bergantung kepada tim verifikasi lapangan dan rendahnya literasi digital masyarakat, di mana sebagian warga masih menggunakan ponsel sederhana dan lebih memilih layanan tatap muka kepada dinas sosial dan kalurahan.

Elemen Value sudah optimal dalam beberapa manfaat yaitu peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses aplikasi PAK MAMAN yang mendukung koordinasi antara instansi serta standarisasi data sesuai teori Indrajit. Namun, masih ditemukannya keterbatasan teknologi, proses verifikasi manual, dan birokrasi approval yang masih kompleks menyebabkan penyaluran bantuan sosial menjadi terlambat dan manfaat e-government belum optimal secara menyeluruh.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan implementasi e-government dalam pengelolaan data DTKS di Dinas Sosial Kabupaten Sleman untuk Optimalisasi Pengelolaan data DTKS yaitu sebagai berikut :

Penyederhanaan proses birokrasi approval Pemerintah pusat dan daerah perlu menyederhanakan mekanisme approval lintas lembaga dalam pengelolaan data DTKS dan DTSEN, proses approval yang melibatkan banyak lembaga perlu di tata kembali agar proses lebih efisien tanpa mengurangi aspek akurasi dan akuntabilitas data, dengan adanya penyederhanaan proses approval diharapkan mampu mempercepat proses verifikasi dan validasi data kemudian finalisasi data. Peningkatan Literasi Digital dan Partisipasi masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Sleman perlu memperkuat sosialisasi terkait pemutakhiran data DTKS dan pemanfaatan Aplikasi PAK MAMAN khususnya kepada masyarakat miskin dan Rentan miskin yang masih memiliki keterbatasan teknologi, dengan pendekatan melalui kegiatan sosialisasi dan pendampingan secara langsung di perangkat desa mampu mendorong masyarakat agar memanfaatkan aplikasi PAK MAMAN sehingga tidak bergantung kepada pelayanan secara konvensional.